



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Telp. 0482-2425381
email : kopukm.sinjal@gmail.com - Kabupaten Sinjai



**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 709 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

37. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);

43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 173);
44. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
45. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 21);
46. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);
47. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
48. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
49. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);
50. Keputusan Bupati Nomor 689 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
51. Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

52.Keputusan Bupati Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

53.Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
Sebelum Perubahan
a. PAD = Rp. 52.800.000,-
b. Pendapatan Transfer = Rp. 00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah = Rp. 00,-

Sesudah Perubahan
a. PAD = Rp. 57.000.000,-
b. Pendapatan Transfer = Rp. 00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah = Rp. 00,-

KETIGA : Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
Sebelum Perubahan
a. BELANJA OPERASI = Rp. 00,-
1. Belanja Pegawai = Rp. 00,-
2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 00,-
3. Belanja Bunga = Rp. 00,-
4. Belanja Hibah = Rp. 00,-
5. Belanja Bantuan Sosial = Rp. 00,-

Sesudah Perubahan
BELANJA OPERASI = Rp. 00,-
1. Belanja Pegawai = Rp. 00,-
2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 00,-
3. Belanja Bunga = Rp. 00,-
4. Belanja Hibah = Rp. 00,-
5. Belanja Bantuan Sosial = Rp. 00,-

		Sebelum Perubahan	
b. BELANJA MODAL	= Rp.		00,-
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp.		00,-
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= Rp.		00,-
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	= Rp.		00,-
4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya	= Rp.		00,-

		Sesudah Perubahan	
BELANJA MODAL	= Rp.		00,-
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp.		00,-
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= Rp.		00,-
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	= Rp.		00,-
4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya	= Rp.		00,-

		Sebelum Perubahan	
c. BELANJA TIDAK TTERDUGA	= Rp.		00,-
Belanja Tidak Terduga	= Rp.		00,-

		Sesudah Perubahan	
BELANJA TIDAK TTERDUGA	= Rp.		00,-
Belanja Tidak Terduga	= Rp.		00,-

		Sebelum Perubahan	
d. BELANJA TRANSFER	= Rp.		00,-
1. Belanja Bagi Hasil	= Rp.		00,-
2. Belanja Bantuan Keuangan	= Rp.		00,-

		Sesudah Perubahan	
BELANJA TRANSFER	= Rp.		00,-
1. Belanja Bagi Hasil	= Rp.		00,-
2. Belanja Bantuan Keuangan	= Rp.		00,-

KEEMPAT : Perubahan Alokasi Pembiayaan Tahun 2021,- Terdiri dari:

		Sebelum Perubahan	
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 48.538.235,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 00,-	

		Sesudah Perubahan	
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 57.550.000,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 00,-	

KELIMA : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Maupun Belanja Transfer sebagai berikut :

	Sebelum Perubahan
a. Triwulan I (Januari s/d Maret)	= Rp. 815.340.937,-
b. Triwulan II (April s/d Juni)	= Rp. 1.106.330.221,-
c. Triwulan III (Juli s/d September)	= Rp. 933.115.364,-
d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	= Rp. 684.553.039,-

	Sesudah Perubahan
a. Triwulan I (Januari s/d Maret)	= Rp. 733.767.804,-
b. Triwulan II (April s/d Juni)	= Rp. 1.157.720.321,-
c. Triwulan III (Juli s/d September)	= Rp. 764.936.067,-
d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	= Rp. 827.881.246,-

KEENAM Atasan Bendahara dan Bendahara SKPD Yaitu:

- a. Atasan Bendahara SKPD:
Nama : Drs. Andi Ilham Abubakar, MH
Jabatan : PLT. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Alamat : Jl. Jend. Sudirman
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD:
Nama : Jumaliah, S.Sos
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Alamat : Jl. Jend. Sudirman
- c. Bendahara Penerimaan SKPD:
Nama : Marmin, S.Sos, MM
Jabatan : Bendahara Penerima
Alamat : Jl. Jend. Sudirman

KETUJUH : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETIYADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
8. Kabag. Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Sinjai;
9. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1. BKAD	<i>[Signature]</i>
2. Bappeda	<i>[Signature]</i>
3. Badan Aset	<i>[Signature]</i>
4. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
5. Kabag. Pembangunan	<i>[Signature]</i>

PARAF BAWAH TANDA TANGGAL BAKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KADIS	<i>[Signature]</i>
4. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
5. KEP BIDANG	<i>[Signature]</i>
6. TAG	<i>[Signature]</i>



KABUPATEN SINJAI

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH.
- b. NIP : 197205121992021001
- c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Keperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2021.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Sinjai, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Hj. RATNAWATIARIE, M.Si.
NIP: 197412041991022001

SEKRETARIAT DAERAH
NIP: 196303291986111004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2021

**DPPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.2.07.0.00.12.0000/001/2021

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.12.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp52.800.000	Rp57.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp52.800.000	Rp57.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp52.800.000	Rp57.000.000
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp3.538.339.561	Rp3.484.207.246
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp2.378.825.595	Rp2.293.227.071
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.162.510.966	Rp1.190.980.175
	Jumlah Belanja	Rp3.538.339.561	Rp3.484.207.246
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp3.485.539.561)	(Rp3.427.207.246)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp48.538.235	Rp57.550.000
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp48.538.235	Rp57.550.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp48.538.235	Rp57.550.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp48.538.235	Rp57.550.000

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp52.938.235	Januari	Rp289.007.595
Februari	Rp4.400.000	Februari	Rp215.894.213
Maret	Rp4.400.000	Maret	Rp228.787.804
April	Rp4.400.000	April	Rp271.346.663
Mei	Rp4.400.000	Mei	Rp401.854.129
Juni	Rp4.400.000	Juni	Rp484.519.529
Juli	Rp4.400.000	Juli	Rp272.810.735
Agustus	Rp4.400.000	Agustus	Rp289.497.313
September	Rp4.400.000	September	Rp202.828.018
Oktober	Rp13.411.755	Oktober	Rp241.272.469
November	Rp4.400.000	November	Rp494.460.082
Desember	Rp6.600.000	Desember	Rp82.148.695
Jumlah	Rp114.550.000	Jumlah	Rp3.484.207.246

Kabupaten Sinjai, 5 Oktober 2021
 Rt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
 Menengah dan Tenaga Kerja



Dra. ANGGI H. LARILAKSI, M.Pd
 NIP. 1962051219901001

Mengesahkan
 DRK

[Signature]
 Dra. H. RATNAWATI ARIF, M.Si
 NIP. 196412041981022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra Hj. Ratnawati Arif, M.Si	196412041981022001	Ketua TAPD	<i>[Signature]</i>
2.	Iwan Suab, S-STP, M.Si	197903221999121001	Wakil Ketua TAPD	
3.	Aadar Amal Dharmawan, SH., MH	197611142000031002	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA PENDAPATAN SKPD							
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021													
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.17.2.07.0.00.12.0000/001/2021													
Organisasi : 2.17.2.07.0.00.12.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KEP'A													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp52.800.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp57.000.000	Rp4.200.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.000.000	Rp4.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp52.800.000	Retribusi Daerah					Rp57.000.000	Rp4.200.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					Rp52.800.000	Retribusi Jasa Usaha					Rp57.000.000	Rp4.200.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp52.800.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp57.000.000	Rp4.200.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat					Rp52.800.000	Retribusi Pemakaian Alat					Rp57.000.000	Rp4.200.000
	:: Retribusi Pemakaian Alat						:: Retribusi Pemakaian Alat						
	::: SPDN Mina Lappa						::: SPDN Mina Lappa						
	Retribusi Pemakaian Alat	1 Tahun	Tahun	Rp52.800.000	Rp52.800.000	Retribusi Pemakaian Alat	1 Tahun	Tahun	Rp57.000.000	Rp57.000.000	Rp4.200.000		
					Jumlah	Rp52.800.000					Jumlah	Rp57.000.000	Rp4.200.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp4.400.000
Februari	Rp4.400.000
Maret	Rp4.400.000
April	Rp4.400.000
Mai	Rp4.400.000
Juni	Rp4.400.000
Juli	Rp4.400.000
Agustus	Rp4.400.000
September	Rp4.400.000
Oktober	Rp4.400.000
November	Rp4.400.000
Desember	Rp8.600.000
Jumlah	Rp57.000.000

Kabupaten Singajaya, 25 Oktober 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Mengesahkan,
PKU

[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Salsawati Asif, M.Si, NIP.
196412041991022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Salsawati Asif, M.Si	196412041991022001	Ketua TAPD	<i>[Signature]</i>
2	Iwan Saich, S.SIP, M.Si	197003221999121001	Wakil Ketua TAPD	<i>[Signature]</i>
3	Akbar Amel Dharmawan, SH, MH	19701114200001002	Wakil Ketua TAPD	<i>[Signature]</i>

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
**DPPA - BELANJA
SKPD**

Kabupaten Singjai
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPPA : DPPA/B.1/2.17.2.07.0.00.12.0000/001/2021

Organisasi : 2.17.2.07.0.00.12.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN TENAGA KERJA

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokus	Jumlah										Perubahan (Berkurang)				
				T (Chikahani)					T (Chikahani)									
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbayar	Belanja Transfer	Jumlah (Subitem)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbayar	Belanja Transfer	Jumlah (Subitem)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12 +13)	15	16	17 = (15+16+17 +18)	18 = (17 - 14)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dana Transfer Umum	Kab. Singjai, Singai Utara, Biringene		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemecah Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Dana Transfer Umum	Kab. Singjai, Singai Utara, Biringene		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dana Transfer Umum	Kab. Singjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dana Transfer Umum	Kab. Singjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Dana Transfer Umum	Kab. Singjai, Singai Utara, Biringene		12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0

					Dana Alokasi Umum														
2	07	05								30.000.000	0	0	0	30.000.000	17.132.000	0	0	0	17.132.000 (12.868.000)
2	07	05	2.01							30.000.000	0	0	0	30.000.000	17.132.000	0	0	0	17.132.000 (12.868.000)
2	07	05	2.01	03	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					30.000.000	0	0	0	30.000.000	17.132.000	0	0	0	17.132.000 (12.868.000)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.437.339.561	0	0	0	3.437.339.561	3.426.097.846	0	0	0	3.426.097.846 (11.241.715)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.862.004.961	0	0	0	2.862.004.961	2.619.779.096	0	0	0	2.619.779.096 (242.225.865)
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					43.497.000	0	0	0	43.497.000	31.808.500	0	0	0	31.808.500 (11.688.500)
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				37.311.000	0	0	0	37.311.000	31.808.500	0	0	0	31.808.500 (5.502.500)



Kode					Tiruan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Dekurang)	B-1	
								I (Sebelum)					II (Sesudah)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdaftar	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdaftar	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.186.000	0	0	0	6.186.000	0	0	0	0	0	(6.186.000)	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.419.978.095	0	0	0	2.419.978.095	2.313.837.171	0	0	0	2.313.837.171	(106.140.924)		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.376.828.595	0	0	0	2.376.828.595	2.293.227.071	0	0	0	2.293.227.071	(83.601.524)	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25.971.700	0	0	0	25.971.700	20.610.100	0	0	0	20.610.100	(5.361.600)	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5.717.600	0	0	0	5.717.600	0	0	0	0	0	(5.717.600)	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.452.200	0	0	0	11.452.200	0	0	0	0	0	(11.452.200)	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.816.000	0	0	0	29.816.000	0	0	0	0	0	(29.816.000)		
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum -			29.816.000	0	0	0	29.816.000	0	0	0	0	0	(29.816.000)	

				Dana Alokasi Umum															
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					201.885.300	0	0	0	201.885.300	163.220.950	0	0	0	163.220.950	(38.664.350)
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum			2.775.000	0	0	0	2.775.000	2.271.850	0	0	0	2.271.850	(503.150)
						Dana Alokasi Umum													
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum			33.736.300	0	0	0	33.736.300	28.572.100	0	0	0	28.572.100	(5.164.200)
						Dana Alokasi Umum													
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum			11.450.000	0	0	0	11.450.000	9.450.000	0	0	0	9.450.000	(2.000.000)
						Dana Alokasi Umum													
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Binaan dan Perawatan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum			3.960.000	0	0	0	3.960.000	620.000	0	0	0	620.000	(3.340.000)
						Dana Alokasi Umum													
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Dana Transfer Umum			149.064.000	0	0	0	149.064.000	122.507.000	0	0	0	122.507.000	(26.557.000)
						Dana Alokasi Umum													
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah					56.999.925	0	0	0	56.999.925	69.929.000	0	0	0	69.929.000	(12.929.075)
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum			53.399.925	0	0	0	53.399.925	40.653.400	0	0	0	40.653.400	(12.746.525)
						Dana Alokasi Umum													

6

2	17	01	2 08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			9.300.000	0	0	0	9.300.000	7.270.000	0	0	0	7.270.000	(2.030.000)	
---	----	----	------	----	---	---	--	--	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------	-------------	--

Kode					Visi	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Ditambah/ (Berkurang)	T-1				
Kode Kecamatan	Kode Kabupaten	Kode Program	Kode Subprogram	Kode Aktivitas				Kode Kategori	T (Jumlah)					T (Jumlah)									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah (Seluruh)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer			Jumlah (Seluruh)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
2	17	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					24.300.000	0	0	0	24.300.000	22.005.600	0	0	0	22.005.600	(2.294.400)	
2	17	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.836.641	0	0	0	79.836.641	40.983.475	0	0	0	40.983.475	(38.853.166)	
2	17	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					58.562.150	0	0	0	58.562.150	40.983.475	0	0	0	40.983.475	(17.578.675)	
2	17	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					21.274.491	0	0	0	21.274.491	0	0	0	0	0	(21.274.491)	
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						31.850.000	0	0	0	31.850.000	7.940.000	0	0	0	7.940.000	(23.910.000)	
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						31.850.000	0	0	0	31.850.000	7.940.000	0	0	0	7.940.000	(23.910.000)	
2	17	04	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Singai, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan				31.850.000	0	0	0	31.850.000	7.940.000	0	0	0	7.940.000	(23.910.000)	
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						277.196.700	0	0	0	277.196.700	440.646.250	0	0	0	440.646.250	163.449.550	
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						277.196.700	0	0	0	277.196.700	277.196.700	0	0	0	277.196.700	0	

2	17	05	2 01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK Non Fisik- PK2UKM	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		277.196.700	0	0	0	277.196.700	277.196.700	0	0	0	277.196.700	0
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	163.449.550	0	0	0	163.449.550	163.449.550
2	17	05	2 03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	DAK Non Fisik- PK2UKM, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	163.449.550	0	0	0	163.449.550	163.449.550
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				54.000.000	0	0	0	54.000.000	286.412.000	0	0	0	286.412.000	232.412.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				54.000.000	0	0	0	54.000.000	286.412.000	0	0	0	286.412.000	232.412.000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.000.000	0	0	0	54.000.000	286.412.000	0	0	0	286.412.000	232.412.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				54.577.400	0	0	0	54.577.400	54.562.000	0	0	0	54.562.000	(15.400)
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				54.577.400	0	0	0	54.577.400	54.562.000	0	0	0	54.562.000	(15.400)

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	%
				T (Subsistem)					F (Sesuai)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer	Jumlah (Subsistem)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer	Jumlah (Sesuai)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
2.17.07.2.0.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.577.400	0	0	0	54.577.400	54.562.000	0	0	0	54.562.000	(15.400)		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			157.710.500	0	0	0	157.710.500	16.758.500	0	0	0	16.758.500	(140.952.000)		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			157.710.500	0	0	0	157.710.500	16.758.500	0	0	0	16.758.500	(140.952.000)		
2.17.08.2.0.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157.710.500	0	0	0	157.710.500	16.758.500	0	0	0	16.758.500	(140.952.000)		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp289.007.595
Februari	Rp215.894.213
Maret	Rp228.767.804
April	Rp271.346.663
Mei	Rp401.854.129
Juni	Rp484.519.529
Juli	Rp272.810.735
Agustus	Rp289.497.313
September	Rp202.628.019
Oktober	Rp241.272.469
November	Rp494.469.982

Kabupaten Sinjai, 25 Oktober 2021
 Pti. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja

